

KAJIAN KERJASAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT (BIOFARMAKA) DI KECAMATAN TENGARAN

Oleh:

Dea Aprilaga Hani - 14010111140146

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Dibalik banyaknya manfaat dan permintaan pasar akan tanaman obat, nasib para petani obat masih kurang cukup sejahtera. Maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk mensejahterakan para petani obat dengan mengggagas kebijakan yang bersifat membantu petani obat. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan Bank Indonesia yang mengajak para pemangku kepentingan lain seperti BPN Provinsi Jawa Tengah, Dinasperindag Provinsi Jawa Tengah, BRI cabang Ungaran, Dinas Perkebunan Kabupaten Semarang dan PT. Sido Muncul dalam sebuah program yang bernama “Program Pengembangan Klaster Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kabupaten Semarang. Dengan banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat maka timbul pertanyaan bagaimana mereka membagi tugas dan bekerja, maka dari itu rumusan masalah yang diangkat adalah: “Bagaimana kerjasama antar pemangku kepentingan dalam Program Pengembangan Klaster Tanaman Obat di Kecamatan Tengaran dan apa faktor penghambat yang dihadapi?”.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses menentukan tugas dan kewajiban para pemangku kepentingan yang terlibat dan juga menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan dan apa faktor penghambat yang dihadapi para pemangku kepentingan. Data yang diperoleh digunakan untuk merumuskan rekomendasi sebagai bentuk masukan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada mulanya Bank Indonesia mengadakan FGD untuk menentukan tugas dan kewajiban dari para pemangku kepentingan, kemudian setelah semua sepakat, dibuatlah nota kesepahaman. pendekatan yang dipakai Bank Indonesia dalam program pengembangan klaster ini adalah pendekatan rantai nilai. Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan

keseluruhan tahap dari proses produksi, sampai ke distribusi ke konsumen. Dalam program ini para pemangku kepentingan mengadakan sosialisasi dan memberikan bantuan berupa peralatan yang dapat digunakan para petani tanaman obat untuk bertani maupun pengolahan paska panen.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah komunikasi dan komitmen merupakan penentu keberhasilan dari sebuah kerjasama, sehingga keduanya harus benar-benar dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat.

Kata Kunci : Kerjasama, Pemangku Kepentingan, Pengembangan Klaster, Tanaman Obat.

ABSTRACT

Study of Cooperation among Stakeholders in Cluster Development Program of Medicinal Plants (medicinal) in Tengaran District

Behind the many benefits and market demand for medicinal plants, the fate of medicinal plant farmers are still not enough prosperous. Therefore, the government has taken an initiative for the welfare of the medicinal plant farmers by initiated a policy that tends to support them. One of the policy was made by the Bank Indonesia which is invites other stakeholders such as BPN Central Java, Central Java Dinasperindag, BRI branch Ungaran, Plantation Office of Semarang regency, and PT. Sido Muncul in a program named "Cluster Development Program of Medicinal Plants in Semarang Regency". Because of so many stakeholders were involved, the question arises how they divide the tasks and work, therefore the formulation of problem taken are: "How is the cooperation among stakeholders in the Cluster Development Program of Medicinal Plants in Tengaran District and what inhibiting factors were faced?".

Based on the issues discussed, this research used qualitative research methods with analytical descriptive research type. The aim of this research was to understand how the process of determining the duties and obligations of the involved stakeholders and also explains how the program run and what inhibiting factors faced by the stakeholders. The data obtained is used to formulate a recommendation as a suggestion for the involved stakeholders.

It can be concluded that at the beginning, Bank Indonesia held a focus group discussion to determine the duties and obligations of stakeholders, and then the memorandum of understanding was made by Bank Indonesia and stakeholders. Bank Indonesia used value chain approach to run the cluster development program. This approach is systematically considering the whole stage of the production process, to distribution to the consumer. In this program stakeholders held socialization and providing aid in form of equipments that can be used by farmers for cultivation of medicinal plants as well as post-harvest processing.

communication and commitment determine the success of a partnership, so both should really be done by involved stakeholders.

Keywords : Cooperation, Stakeholder, Cluster Development, Medicinal Plants

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini tak hanya digunakan sebagai bahan pangan ataupun untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi juga bermanfaat sebagai bahan untuk mengobati berbagai penyakit. Di Indonesia tumbuh berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan untuk obat atau yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh yang dapat dijumpai di kehidupan sehari – hari. Tanaman seperti kunyit, jahe, dan jeruk pecel dapat ditanam di pekarangan rumah dan berguna sebagai pengusir berbagai penyakit ringan sehari – hari seperti batuk, masuk angin, dan panas dalam. Tak hanya itu, beberapa tanaman yang tumbuh di Indonesia terbukti ampuh mengatasi berbagai penyakit yang lebih berat. Bahkan beberapa tanaman dipercaya dapat mengatasi penyakit mematikan seperti AIDS, kanker, dan sebagainya. Tanaman obat juga dapat dijadikan alternatif berobat yang lebih aman dan alami, selain itu tanaman obat juga baik untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit dan tubuh.

Potensi tanaman obat di Kabupaten Semarang terbesar di wilayah Tenganan, Sumowono, dan Ungaran Timur dengan luas lahan sebesar 115 ha dengan jumlah produksi untuk tanaman jahe, dan kunyit sebanyak lebih dari 4 – 6 ton/ha, jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 36 yang masing – masing memiliki 6 – 10 kelompok dengan anggota perkelompok sebanyak 25 – 80 orang. Penguatan Gapoktan menjadi prioritas utama untuk dapat menjadi lembaga bisnis yang dapat mengelola komoditas tersebut, sehingga siap berbisnis langsung dengan perusahaan jamu yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan para petani.

Penguatan Gapoktan di Kabupaten Semarang juga tidak menutup kemungkinan bagi Gapoktan untuk berbisnis dengan pihak lain di wilayah ini karena mempunyai potensi besar untuk komoditas tanaman obat.

Pemanfaatan dan pengolahan jamu sebagai obat tradisional tidak lepas dari UMKM dan industri besar jamu yang membuat produk jamu bisa dinikmati dengan praktis. Peran UMKM dalam perekonomian nasional tidak perlu diragukan lagi. Hal ini didasarkan paling tidak pada tiga argument pokok. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa jumlah UMKM pada tahun 2010 telah mencapai lebih dari 52 juta atau berjumlah 99,9% dari seluruh unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada perusahaan besar. Sektor UMKM menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56,53% dari total PDB nasional. Oleh karena itu sangat wajar jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama harus memberikan perhatian yang besar untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, mandiri, serta dapat berkembang kearah strata yang lebih tinggi.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki pilar – pilar kebijakan strategi yang meliputi : 1) Pengaturan kepada perbankan yang mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM, 2)

Pengembangan kelembagaan yang menunjang, 3) Pemberian bantuan teknis, 4) Kerjasama dengan berbagai pihak dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya. Khusus untuk kerjasama dengan berbagai pihak dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya, direalisasikan oleh Bank Indonesia melalui sinergi dengan program pemerintah. Beberapa kementerian memiliki berbagai program untuk mendorong pengembangan UMKM, yang meliputi program penguatan UMKM maupun program atau skim pembiayaan. Untuk itu dilakukan sinergi dengan kementerian ditingkat pusat dan sinergi dengan pemda di tingkat daerah. Kebijakan Bank Indonesia dilakukan melalui dua sisi : 1) sisi *demand* (sektor riil dan UMKM) yakni dalam rangka memperkuat sektor riil dan UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan klaster nasional untuk mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan upaya pengembangan ekonomi daerah, untuk ditingkat daerah pengembangan klaster disesuaikan dengan prioritas daerah ; 2) sisi *supply* (sektor perbankan) yakni dalam rangka mendorong perbankan agar lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor riil khususnya UMKM, melalui peningkatan penyerapan skim kredit program pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Maret 2008 telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerjasama pengembangan Ekonomi Jawa Tengah. Adapun maksud dari nota kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengembangan ekonomi terpadu di Jawa Tengah. Nota kesepahaman ini juga bertujuan mensinergikan pelaksanaan perekonomian daerah melalui koordinasi yang hasilnya berupa rekomendasi dan langkah aktif lain

guna memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jawa Tengah serta mendukung program pembangunan ekonomi nasional.

Selanjutnya dalam rangka turut berperan serta dalam gerakan “*Bali Ndeso Mbangun Ndeso*” sekaligus implementasi nota kesepahaman tersebut, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia wilayah V bersama dengan pemangku kebijakan terkait yakni Pemerintah Kabupaten Semarang beserta jajaran SKPD Kabupaten Semarang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, PT Sido Muncul, dan PT BRI, berkontribusi bersama melaksanakan program Pengembangan Klaster Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kabupaten Semarang (Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Sumowono) untuk jenis tanaman jahe, Kunyit, dll. Kontribusi bersama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 13/30/DKBU/BPBU/Sm, No.32/2096/2011, No.2959/17-33.500/V/2011, No. 415.4/07/KJS/2011, No. B. 1625/ADK/05/11, dan No. 3365/KRD.01.03/2011 tanggal 11 Mei 2011.

Pengembangan klaster diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga sisi penawaran yang juga berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Pendekatan klaster dinilai strategis karena beberapa alasan yaitu : bersifat terintegrasi, meningkatkan daya tawar, efisiensi biaya serta berdampak bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pendekatan klaster juga diharapkan mampu menstimulasi inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku dalam hubungan hulu – hilir serta mendorong peningkatan keterkaitan sosial dan peningkatan keahlian masing – masing anggota klaster. Melalui program pengembangan klaster tersebut,

diharapkan produktivitas dan daya saing tanaman obat (biofarmaka) di Kabupaten Semarang mampu menjadi pendorong perekonomian di wilayah sekitarnya.

Penelitian ini menetapkan Kecamatan Tengaran sebagai sampel wilayah yang akan diteliti karena Kecamatan Tengaran masuk salah satu kecamatan di Kabupaten Semarang yang menjadi prioritas penerapan program Pengembangan Klaster Tanaman Obat mengingat jumlah produksi tanaman obat di daerah Tengaran yang tergolong tinggi dan juga kelompok Gapoktan yang aktif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik meneliti mengenai “ Kajian Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan Dalam Program Pengembangan Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kecamatan Tengaran”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama antar pemangku kepentingan dalam Program Pengembangan Klaster Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kecamatan Tengaran dan faktor penghambat apa yang dihadapi.

Teori yang digunakan penulis adalah teori *networking* dan teori pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan teori yang dipakai, penulis mencoba mencabarkan proses kerjasama yang terjadi antar pemangku kepentingann dalam program tersebut.

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, arsip, dan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Program Pengembangan Klaster Tanaman Obat (Biofarmaka)

Program ini dilatar belakangi oleh kerjasama PT. Sido Muncul dengan Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2011 Bank Indonesia bersama dengan pemangku kepentingan yang lain (BPN Provinsi Jawa Tengah, Dinasperindag Provinsi Jawa Tengah, BRI cabang Ungaran, PT. Sido Muncul, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Semarang) mulai menjalankan sebuah program yang bertujuan memajukan para petani dan UMKM terkait dengan tanaman obat di Kabupaten Semarang. Program Pengembangan Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kabupaten Semarang ini dimulai dengan Bank Indonesia sebagai fasilitator yang merancang pola kerjasama yang akan dilaksanakan, Bank Indonesia mengajak para pemangku kepentingan yang lain untuk mengadakan FGD dengan tujuan menentukan tugas dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Hasil dari FGD tersebut adalah :

1. Bank Indonesia Wilayah Semarang, berkewajiban meningkatkan kapasitas dan kinerja UMKM yang berada dalam klaster.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang beserta jajaran SKPD Kabupaten Semarang, berkewajiban membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta memfasilitasi pelatihan dan pendampingan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban memfasilitasi peralatan pengolahan pasca panen serta melaksanakan pelatihan beserta fasilitatornya di bidang packaging dan pemasaran produk.
4. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkewajiban memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah bagi para pelaku UMKM dan melaksanakan pendampingan pasca sertifikasi agar asset tanah yang sudah bersertifikasi dapat digunakan untuk akses ke perbankan.
5. PT Sido Muncul, berkewajiban memfasilitasi pelatihan pendampingan untuk dapat menghasilkan komoditas tanaman obat sesuai standarisasi yang sudah ditetapkan dan menerima hasil produk tanaman obat tersebut.
6. PT BRI Wilayah Ungaran, berkewajiban menyediakan pembiayaan untuk pengembangan tanaman horticultural maupun usaha yang berhubungan dengan pengembangan tanaman horticultural melalui skim kredit KKPE maupun skim kredit lainnya sesuai dengan standar kelayakan perbankan.

Dalam pelaksanaan program ini, Bank Indonesia menggunakan pendekatan *value chain*, dimana pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahap dari proses produksi sampai penjualan dan juga analisis dari

berbagai ketertarikan dan aliran informasi sepanjang rantai nilai. Para pelaku/pemangku kepentingan dalam *value chain* saling bekerjasama untuk menentukan tujuan bersama, saling berbagi resiko, dan manfaat, serta melakukan investasi baik dalam hal waktu, tenaga, dan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan hubungan kerja diantara mereka.

2. Pola Kerjasama antar Pemangku Kepentingan

Apabila kemitraan atau kerjasama ini dianalisis berdasar Provan dan Kenis dalam jurnal *Local Tourism Governance: A Comparison of Three Network Approaches*¹ dengan memberikan penjelasan tentang tiga unsur yang mempengaruhi pendekatan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan bertaraf lokal maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemimpin organisasi, yaitu sebuah jaringan dimana organisasi yang memimpin mengambil peran sentral dalam hal koordinasi, memfasilitasi dan memungkinkan terciptanya potensi kolaborasi, sering memberikan kontribusi dalam bentuk dukungan dan kepemimpinan. Secara kemampuan umumnya terpusat dan komunikasi dan pengambilan keputusan biasanya terjadi secara top-down. Dalam kerjasama pengembangan klater tersebut pemimpin organisasi bisa diartikan BI sebagai fasilitator, menjabarkan skema awal, memfasilitasi dan

¹ <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669580903215139> diakses pada 25 September 2015 pukul 20.00 WIB

berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan selama program tersebut berjalan.

2. Jaringan peserta, yang merupakan jaringan dimana anggotanya sendiri berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang seharusnya berada diluar jangkauan pemangku kepentingan individu. Hubungan jaringan antar peserta umumnya diatur terdesentralisasi, kurang formal dan tergantung pada modal sosial dan manusia yang ada di anggotanya. Jaringan anggota dimana para pemangku kepentingan (selain fasilitator) berkoaborasi mengenai tugas dan wewenangnya dan menjangkau tujuan yang berada diluar jangkauan dari tiap pemangku kepentingan yaitu mengembangkan klaster secara kompleks.
3. Jaringan organisasi administrasi, yang merupakan jaringan dimana terdapat lembaga administratif yang terpisah didirikan khusus untuk melakukan kegiatan kontrol terhadap pemerintahan dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks kerjasama dalam program ini yang dimaksud jaringan organisasi administratif tersebut adalah Koperasi Artha Farma dimana koperasi tersebut didirikan khusus untuk membantu Gapoktan Bina Indika dalam menangani masalah mereka yaitu pemasaran.

Apabila kemitraan atau kerjasama tersebut diruntut menggunakan tipe kerjasamanya maka, tipe kerjasama dalam program pengembangan klaster tanaman obat ini adalah **Co-operative Networks**. Tipe ini berada pada level kuat dengan tingkat kerjasama yang tinggi dalam merumuskan kebijakan bersama.

Berbeda dengan tipe individualistik yang rendah dalam hal kepercayaan, tipe ini menekankan kepercayaan sebagai bagian dasar dari pembentukan jaringan.

3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan program ini, secara garis besar faktor penghambat yang dihadapi adalah pihak petani yang terkadang bersifat tidak konsisten. Melalui program ini, para petani tanaman obat harus menyetorkan hasil panen mereka ke Koperasi Artha Farma, untuk selanjutnya Koperasi Artha Farma memilah dan mengolah hasil panen para petani obat ke dalam standar mutu yang ditetapkan oleh PT. Sido Muncul yang berperan sebagai konsumen. Sebagai konsumen yang sudah memiliki nama besar, PT. Sido Muncul memiliki standar kualitas dan kuantitas yang harus dipenuhi Koperasi Artha Farma dan Gapoktan Bina Indika terkait hasil panen yang dijual ke PT. Sido Muncul. Dengan adanya fluktuasi naik turunnya harga hasil panen tanaman obat membuat para petani tidak selalu menjual hasil tanaman obat mereka ke koperasi karena terkadang tengkulak menawarkan harga yang lebih tinggi, dan hal tersebut berdampak pada kegagalan koperasi memenuhi standar kuantitas yang harus disetor ke PT. Sido Muncul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta, 2004. Hlm 25
- Bappenas. *Modul Penerapan Prinsip – Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik*. 2007. hlmn 105
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Sosial. Format-format Kualitatif dan Kualitas*. Surabaya. Airlangga University Press. 2001. Hlmn 48
- Cony R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010, hlm 40-43
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. 2010. Hlm 165
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm 34-35
- Kariem, Anwar Sanusi,. *Manajemen Kemitraan Pemerintah dan Swasta*. STIA Press ,Jakarta, 2003. Hlmn 12
- Pamudji. *Kerjasama Antar Daerah*. 1985. Hlmn 12-13
- Pratikno, dkk. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM & DEPDAGRI, 2004. Hlm 117
- Satori Djam'an, Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012. Hlm. 22
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung , 2011. Hlm. 1
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 16
- S. Nasution, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009. Hlm 98

Lexy J. Moleong, M.A.. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008. Hlm. 248

B. Website

<http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/01/09> diakses pada 26 Januari 2015 pukul 22.00 WIB

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669580903215139> diakses pada 25 September 2015 pukul 20.00 WIB

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting/conf_lieber.pdf diakses pada 25 September 2015 pukul 21.00 WIB

C. Peraturan-peraturan

PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah pasal 12.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 195.